

I

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN **FEB** MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 **20** 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 1

TAHUN 2006

BURSA CALON DIRUT PLN MEMANAS Rencana Kenaikan TDL Berbau Kolusi

Jakarta, RM. Secara teori, pemerintah tidak perlu menaikkan tarif dasar listrik (TDL). Hal ini terkait harga minyak dunia yang masih rendah. Anggota Panitia Anggaran DPR Ramson Siagian berani memastikan, harga TDL tidak naik lagi karena dengan menurunnya harga minyak dunia, akan menyebabkan HPP

(harga pokok penyediaan) listrik turun lebih dari Rp 10 triliun.

"Dengan tidak naiknya TDL, berarti rakyat dan kalangan industri akan berkurang beban ekonominya. Kalau dinaikkan berarti pemerintah mengada-ada dan tidak realistis," tegas Ramson kepada *Rakyat Merdeka*, tadi malam.

Dijelaskan, dalam APBN 2006, asumsi harga minyak mentah (ICP atau Indonesian crude price) 57 dolar AS per barel dan subsidi BBM sebesar Rp 54,3 triliun. Wakil Ketua FPDIP bi-

dang Ekuang itu menambahkan, pada awal April 2006, potensi penurunan harga BBM bersubsidi sangat kuat. Kalaupun harga BBM bersubsidi tidak segera turun awal April ini, kompensasinya bisa menambah subsidi listrik sekitar Rp 7 triliun, karena dengan harga crude oil sekitar 50 dolar AS per barel, akan ada penurunan biaya BBM dalam struktur biaya listrik sekitar Rp 10 triliun.

Berbeda dengan Ramson, Ketua Lembaga Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Indonesia Bersatu (LPPIB)

Daniel Hutapea mendesak rencana kenaikan TDL agar diusut tuntas.

"Di balik rencana kenaikan TDL ini, pasti ada kepentingan pengusaha atau deal mereka dengan pihak pengambil keputusan. Seperti kolusi lah tudingnya. Dugaan KKN di balik rencana kenaikan TDL ini didasari penelitiannya terhadap perbandingan TDL sejumlah negara Asia Tenggara.

Ditolak Dalam

Sementara terkait dengan calon dirut PLN, pemerintah diminta segera mengambil sikap. Hal ini untuk mencegah spekulasi yang meluas dan jadi ajang

perebutan parpol. "Jadi sebaiknya pemerintah segera mengambil sikap tegas," kata anggota Komisi VII dari Fraksi PKS Wahyudin Munawir di Jakarta, kemarin.

Sementara Ketua Umum Forum Komunikasi Putra-Putri Pensiunan PLN (PK4P) Okky Setiawan sependapat dengan PKS. Untuk calon orang dalam dia menyebut beberapa nama, seperti bekas Dirut Indonesia Power (IP) Firdaus Akmal, Abimanyu Suyoso yang saat ini menjabat Dirut Indonesia Power, Dirkeu IP Praktimia Semilawan, Wakil Dirut Dana Pensiun PLN W Sulaiman. ■ HPS/GPG/MAF

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 7		TAHUN 2006

Pemerintah Harus Tentukan Sikap Soal Direksi PLN

JAKARTA - Pemerintah diminta segera mengambil sikap untuk menentukan posisi Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi spekulasi yang meluas dan menjadi ajang perebutan parpol.

"Yang saya dengar, masa jabatan Dirut memang seharusnya sudah habis. Kebetulan kemudian masalah hukum muncul bersamaan, jadi sebaiknya pemerintah segera mengambil sikap tegas," kata anggota Komisi VII dari Fraksi PKS Wahyudin Munawir di Jakarta, Minggu (19/2).

Untuk diketahui, pergantian Dirut PLN dari Kuntoro Mangkusubroto kepada Eddie Widiono berdasarkan Keputusan Menteri No 108/KMK.05/2001, pada Maret 2001.

Menurut Wahyudin, yang berhak mengganti posisi direksi adalah Kementerian BUMN. Karena itu, kata Wahyudin, presiden seharusnya segera memberi arahan kepada menteri terkait untuk segera mengambil sikap.

Sementara itu, Ketua Umum Forum Komunikasi Putra-Putri Pensiunan PLN (PK4P) Okky Setiawan sependapat bahwa pemerintah harus segera mengambil sikap untuk menentukan nasib direksi PLN. "Jika nasib PLN dibiarkan terkatung-katung cukup lama, akhirnya akan memengaruhi kinerja perusahaan," kata dia.

Dia menduga, masalah yang saat ini dihadapi PLN pada akhirnya bermuara pada pergantian pimpinan puncak PLN. Padahal, kata Okky, kinerja direksi saat ini

masih cukup baik

Okky menambahkan, kalau pun pergantian itu terjadi, hendaknya PLN tetap diisi oleh orang dalam yang mengerti seluk-beluk PLN, dan bukan dari kalangan parpol. "Masalah PLN cukup teknis dan pelik. Sangat berisiko bila diisi oleh orang luar PLN, apalagi titipan parpol," tandasnya.

Menurutnya, masih banyak orang dalam PLN yang layak untuk menjadi dirut. Dia sebutkan beberapa nama, seperti mantan Dirut Indonesia Power (IP) Firdaus Akmal, Abimanyu Suyoso yang saat ini menjabat Dirut Indonesia Power, Dirkeu IP Pratiwi Semiawan, Wakil Dirut Dana Pensiun PLN W Sulaiman. Bahkan, kata Okky, beberapa direksi PLN juga layak menjadi dirut, seperti Direktur Transmisi dan

Distribusi Herman Darnel Ibrahim, Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan Sunggu Aritonang, dan Dirkeu Parno Isworo. "Siapa pun, yang penting orang dalam PLN, bukan parpol," tegas Okky.

Belum Saatnya

Menanggapi hal itu, juru bicara PLN Muljo Adji mengatakan masa jabatan direksi saat ini belum berakhir. "Berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan, masih dua tahun lagi," kata Muljo.

Masa jabatan itu, kata dia, dihitung berdasarkan pergantian susunan direksi yang terjadi pada tahun 2003, yakni keputusan No 062.K/010/DIR/2003, tanggal 4 Maret 2003. Namun, kata Muljo, sebelum masa jabatan berakhir, bisa saja pemerintah mengganti direksi dengan beberapa alasan, misalnya yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatannya atau dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya.

Sekretaris Menneg BUMN Said Didu kepada *Investor Daily* mengatakan, kinerja direksi PLN saat ini baik, sehingga tidak ada rencana pemerintah untuk mengganti dalam waktu dekat. "Pada 2004 kinerjanya A, sementara 2005 BB itu pun karena ada kenaikan harga BBM. Jadi, masih cukup bagus," kata dia.

Dia minta semua pihak berhenti mempolitisasi masalah BUMN. "Apalagi, kata dia pemerintah tidak akan gegabah melakukan pergantian direksi tanpa ada dasar hukum yang jelas. "Semua dilakukan sesuai perundangan, bukan berdasarkan tekanan politik atau unsur manapun," tegas Said. (es)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2006

Polisi Konfrontir Dirut PLN

JAKARTA — Penyidik Bareskrim Mabes Polri akan mengkonfrontir keterangan Direktur Utama (Dirut) PT PLN Eddie Widiono dengan para tersangka kasus dugaan *mark-up* proyek pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Borang. Namun sebelum melakukan konfrontir, penyidik akan melakukan *cross-check* keterangan Dirut PLN itu dengan para tersangka.

"Kami masih memerlukan waktu untuk menuntaskan kasus PLN. Kami sudah mendapatkan keterangan dari beberapa tersangka yang kita tahan, yakni Ali Herman, Agus Darnadi, dan

Johannes Kenedy. Nantinya keterangan itu akan dikonfrontir dengan keterangan Dirut PLN," ujar Wakadiv Humas Mabes Polri, Brigjen Anton Bachrul Alam, akhir pekan lalu.

Penyidik Mabes Polri hingga saat ini telah memeriksa Eddie Widiono sebanyak empat kali dan kemungkinan pemanggilan kelima masih akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebelumnya, Mabes Polri telah menetapkan dan menahan tiga tersangka. Mereka adalah Direktur Pembangkit dan Energi Primer PT PLN Ali Herman Ibrahim, Deputy Direktur Pembangkit PT PLN Agus Darnadi, dan Dirut PT Guna Cipta Mandiri Johannes Kennedy Aritonang (rekanan PLN dalam proyek pembelian mesin tersebut). ■ eye

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : \

TAHUN 2006

PLTU Cilacap Sulit Masuk Sistem Jawa-Bali

Proyek PLTU Cilacap, yang menurut rencana semula sudah beroperasi mulai akhir tahun 2005, beberapa kali mengalami masalah teknis menyangkut putaran turbin pembangkitnya. Bila PLTU Cilacap Unit I tidak juga beroperasi mulai Maret 2006, PLN selaku pengelolanya harus menanggung rugi minimal Rp 3,5 miliar per hari -- berdasar hitungan bahwa BPP listrik 6,5 sen dolar per kWh. Di samping itu, PLTU Cilacap Unit II juga niscaya menjadi tidak bisa memenuhi target operasi mulai Juni 2006.

Kalau kemampuan PLTU Cilacap ini tidak sesuai rencana, persoalan lain akan segera muncul, seperti yang kini dialami PLTU Tanjung Jati B. Pemasangan jaringan transmisi pada PLTU Tanjung Jati B yang belum selesai -- bahkan sudah terlambat dari jadwal -- membuat Indonesia terancam klaim hingga ratusan miliar rupiah. "Kita berharap PLTU Cilacap jangan sampai seperti itu," kata sumber.

Setelah satu bulan terakhir berhasil lolos serangkaian pengujian, pekan ini PLTU Cilacap memasuki tahap uji beban ke sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali). Secara bertahap sampai pertengahan Februari 2006, daya

2x300 MW yang dihasilkan PLTU berbahan bakar batu bara ini akan tersambung ke sistem interkoneksi Jamali. Namun demikian, mengingat berbagai kendala teknis tadi, banyak pihak meragukan bahwa daya 600 MW akan tercapai. Bahkan daya yang dihasilkan PLTU Cilacap Unit I saja diperkirakan tidak melebihi 100 MW.

Menurut General Manager Pusat Pengatur Beban (P3B) PT PLN Mulyo Aji, beroperasinya PLTU Cilacap akan menguntungkan: menambah kualitas dan kehandalan pasokan listrik -- terutama untuk Jateng dan Jabar Selatan --, melayani pertumbuhan beban di sistem Jamali, serta mengurangi pemakaian bahan bakar minyak (BBM).

PLTU Cilacap adalah milik PT pembangkitan Jawa Bali (PJB) dan PT Sumberenergi Sakti Prima (SSP). Proyek tersebut dikelola oleh PT Sumber Segara Primadaya (S2P). Beroperasinya PLTU Cilacap berdampak mengurangi pemakaian BBM hingga 875 juta liter per tahun.

Biaya pembangunan PLTU Cilacap ini hanya 850 dolar AS per kWh. Ini relatif murah karena umumnya harga pembangkit listrik di atas 1.000 dolar AS per kWh. Harga jual-

nya juga kompetitif, yaitu 4,57 sen dolar AS per kWh, Sementara harga jual PLTU umumnya berkisar 4,6 hingga 4,93 sen dolar AS per kWh.

Sejak dimulai 29 Desember 2003, proses pembangunan PLTU Cilacap ini rampung hanya dalam tempo 24 bulan. Padahal menurut pengalaman, pembangunan PLTU berkapasitas 300 MW memerlukan waktu minimal 36 bulan.

Direktur Proyek PLTU Cilacap Liu Yiheng mengatakan, semula banyak yang meragukan bahwa proyek tersebut bisa rampung dalam tempo 24 bulan. "Sebelum kontrak kami tandatangi, kami sudah melakukan investigasi. Kami yakin, pekerjaan bisa diselesaikan sesuai jadwal karena kami sudah berpengalaman," katanya.

Mengenai kualitas mesin, menurut Liu Yiheng, tidak perlu diragukan. Pabrik di China, katanya, sudah sangat berpengalaman dalam membuat mesin berkapasitas 300 MW. Bahkan lebih dari 300 unit mesin berkapasitas 300 MW beroperasi di China dan beberapa negara lain. Beberapa unit bahkan telah beroperasi selama beberapa dekade. "Kami yakin mesin pembangkit PLTU Cilacap ini mampu beroperasi dengan baik selama lebih dari 25 tahun," tandasnya. (Rully/Sabprl)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

Abu Terbang PLTU Ancam Warga Cilacap

TAHUN 2006

CILACAP, (PR).-

Warga di sekitar kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Desa Karangandri, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap Jawa Tengah dikhawatirkan terancam kesehatannya, sebagai dampak abu terbang (*fly ash*) dari pembangkit listrik berbahan bakar batu bara yang segera beroperasi tersebut. Di sisi lain, sosialisasi hasil analisis dampak lingkungan (amdal), termasuk apakah pengelolaan abu terbang memadai atau tidak dinilai kurang transparan.

Padahal, menurut Direktur Pusat Studi Lingkungan dan Kebijakan (Pusaka) Cilacap, Chabibul Barnabas, abu terbang dari batu bara membutuhkan penanganan khusus, baik di tempat batu bara digunakan atau di lokasi lain. Sebab, secara alami batu bara mengandung uranium dan torium.

"Artinya, abu terbang dari PLTU Cilacap mengandung kedua zat berbahaya tersebut. Lebih jelas lagi, abu terbang berpotensi memicu radiasi. Jika tidak ditangani serius, warga yang menghirup udara dengan kandungan uranium dan torium bisa terjangkit kanker dan penyakit lainnya," ujar Abas --panggilan Barnabas-- lewat rilis yang diterima "PR", Minggu (19/2).

Mengutip hasil penelitian Badan Tenaga Atom Nasional (Batan), dia mengungkapkan, tingkat risiko penggunaan batu bara bergantung pada sifat fisik dan radiologis dari abu terbang yang dihasilkan serta bagaimana (abu terbang) tersebut terdistribusi atau digunakan lagi.

"Terus terang kami mengkhawatirkan dampak abu terbang PLTU terhadap kesehatan warga sekitarnya. Apalagi, kami

juga belum mendengar ada sosialisasi secara jelas dari pihak manajemen PLTU ataupun pemerintah Cilacap," tambah Abas pula.

Terkait dampak abu terbang ini, pihaknya berharap ada perhatian serius dari manajemen serta Pemerintah Cilacap. Kendati dampak tersebut tidak secara langsung dirasakan, udara bersih adalah hak warga seperti halnya hak untuk hidup.

Bahan semen

Berdasarkan kajian Pusaka, lanjut dia, pihaknya mendesak agar abu terbang dimanfaatkan pabrik semen -- yang juga ada di Cilacap -- sebagai bahan campuran membuat semen. "Abu terbang tidak memiliki kemampuan mengikat seperti halnya semen. Namun, kehadiran air dan ukuran partikelnya yang halus, oksida silika yang dikandung akan bereaksi secara kimia dengan kalsium hidroksida yang terbentuk dari proses hidrasi semen dan menghasilkan zat yang memiliki kemampuan mengikat," paparnya.

Keberadaan kalsium hidroksida dalam beton merupakan salah satu sumber perusak beton sebelum waktunya, terutama jika beton berada di lingkungan yang agresif. Dengan demikian, penambahan/bahan semen dengan abu terbang berpotensi menambah keawetan beton tersebut.

Sejauh ini, belum ada penjelasan dari manajemen PLTU atau Pemkab Cilacap tentang pengelolaan serta upaya meminimalisasi abu terbang yang keluar dari cerobong pembangkit. Tetapi sebelumnya, Kabag Pembangunan Pemkab Cilacap, Drs. Slamet menegaskan pembangunan PLTU sudah melalui kajian amdal sehingga tidak ada lagi persoalan. (A-100/A-99)***

5

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN **FEB** MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 **20** 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 15

TAHUN 2006

PLTU Mpanau beroperasi Mei

PALU: Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mpanau berkapasitas 2X15 megawatt yang dibangun di utara Kota Palu, Sulawesi Tengah, diharapkan beroperasi Mei 2006.

Wakil Walikota Palu Suardin Suebo mengatakan pihak investor PT Pusaka Jaya Palu Power (PJPP) terus memacu pembangunan dan optimistis dapat menyelesaikan sesuai tenggat waktu yang diberikan.

"Kami optimistis pembangunan PLTU itu rampung dan beroperasi sesuai target yang telah ditetapkan," katanya, akhir pekan lalu.

Dia menjelaskan progres pembangunan PLTU sudah sekitar 85%. Oleh sebab itu, jika proses pembangunan terus berjalan lancar, kemungkinan besar Mei 2006 pembangkit yang menggunakan bahan bakar batu bara itu mulai memasuki tahap ujicoba pengoperasian.

"Target kita paling lambat Mei sudah menyuplai energi listrik kepada masyarakat dan kalangan industri." (ANTARA)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2006

Hipmi tetap tolak rencana kenaikan TDL

Oleh BAMBANG SUPRIYANTO
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Pengusaha muda yang tergabung dalam Hipmi DKI Jaya tetap menyatakan penolakan rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL), kendati pemerintah menunda sementara kenaikan dan menawarkan dialog *b-to-b* dengan PLN.

"Kami tetap menolak berapapun kenaikan TDL saat ini, karena akan memberikan dampak kenaikan biaya dan penurunan omzet. Kami belum memperhitungkan besarnya kenaikan biaya, karena ti-

dak dapat mengandaikan kemungkinan besaran kenaikan TDL. Tapi omzet pasti turun. Pascakenaikan, BBM saja omzet anggota kami turun sekitar 23%," kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) DKI Yukki N. Hanafi, pekan lalu.

Dia tetap memilih konsisten sikap, karena situasinya sangat memberatkan pelaku usaha. Pada awal tahun ini, lanjutnya, pengusaha masih merasakan dampak beban kenaikan harga BBM dan UMP (upah minimum provinsi).

"Awalnya kami mengharapkan angin segar kebijakan pemerintah pada awal tahun ini. Kenaikan ini akan kontraproduktif karena sejauh ini anggota Hipmi DKI belum mampu melakukan pemulihan usaha, akibat kenaikan harga BBM pada Oktober 2005."

Sebaliknya, lanjutnya, dengan rencana kenaikan TDL itu pengusaha menghadapi situasi yang tidak pasti, misalnya, harus melakukan perubahan perencanaan anggaran dan asumsi penjualannya. "Bagaimana kami dapat berusaha

dengan tenang, kalau setiap waktu harus merubah bujet perusahaan, akibat rencana pemerintah yang akan mengganggu kestabilan dan pertumbuhan ekonomi."

Menurut Yukki, kenaikan TDL tersebut juga akan mempengaruhi daya beli konsumen, sehingga sejumlah produk dan jasa yang ditawarkan tidak akan diminati.

Dia mengharapkan agar beban-beban biaya yang ditanggung PLN akibat inefisiensi tidak dibebankan kepada dunia usaha.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : T6

TAHUN 2006

'Usaha mikro pakai listrik rumah tangga'

JAKARTA: Gappmi memperkirakan belum adanya reaksi usaha mikro dan kecil terhadap rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) karena mereka umumnya menggunakan listrik rumah tangga, yang tidak terkena beban biaya tinggi.

"Banyak usaha mikro, kecil, dan rumah tangga yang menggunakan tarif listrik rumah tangga 450 watt - 1.300 watt, sehingga tak ada reaksi mereka atas rencana kenaikan TDL," ujar Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Thomas Darmawan, kemarin.

Hal itu dikemukakannya menanggapi pernyataan Menperin Fahmi Idris bahwa penolakan rencana kenaikan TDL lebih banyak dilakukan pengusaha besar, sedangkan UKM tidak. (ANTARA)

8

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 16

TAHUN 2006

Pemerintah Harus Ambil Sikap Soal Direksi PLN

JAKARTA — Sejumlah kasus yang mendera PT Perusahaan Listrik Negara (PLN persero) menyebabkan sulit bergeraknya perusahaan listrik itu. Karena itu, beberapa kalangan meminta agar pemerintah mengambil sikap atas posisi direksi yang sekarang, termasuk direktur utamanya.

Selain itu, anggota DPR Komisi VII dari Fraksi PKS, Wahyudin Munawir, menyatakan agar tidak terjadi spekulasi yang meluas dan menjadi ajang perebutan partai politik. "Jadi, harus ada sikap tegas pemerintah," katanya di Jakarta, Ahad (19/2).

Menurut Wahyudin, yang berhak mengganti direksi adalah Kementerian BUMN. Karena itu, kata Wahyudin, pre-

siden seharusnya segera memberi arahan kepada menteri terkait untuk segera mengambil sikap, mengganti atau meneruskan.

Seiring merebaknya dugaan korupsi pembangunan PLTG Borang di Sumatra Selatan, Dirut PLN, Eddie Widiono, diperiksa berkali-kali oleh kepolisian. Sementara satu direksi dan staf ahlinya sudah dijadikan tersangka dan kini masih ditahan.

Spekulasi atas penggantian direksi PLN saat ini pun muncul, termasuk di sejumlah partai politik. Wahyudin tidak menampik bahwa posisi Dirut PLN cukup menggiurkan bagi sejumlah parpol besar mengingat aset yang dimiliki PLN mencapai Rp 200 triliun.

Ketua Umum Forum Komunikasi Putra-Putri Pensiunan PLN (PK4P) Okky Setiawan sependapat bahwa pemerintah harus segera mengambil sikap untuk menentukan nasib direksi PLN. "Jika nasib PLN dibiarkan terkatung-katung cukup lama, akhirnya memengaruhi kinerja perusahaan," kata dia.

Okky menduga masalah yang saat ini dihadapi PLN pada akhirnya bermuara pada pergantian pimpinan puncak PLN. Padahal, kata Okky, kinerja direksi saat ini masih cukup baik.

Ia menambahkan, walaupun pergantian itu terjadi, hendaknya PLN tetap diisi oleh orang dalam yang mengerti seluk-beluk PLN, dan bukan

dari kalangan parpol. "Masalah PLN cukup teknis dan pelik. Sangat berisiko bila diisi oleh orang luar PLN, apalagi titipan parpol," tandasnya.

Menurutnya, masih banyak orang dalam PLN yang layak untuk menjadi dirut. Dia sebutkan beberapa nama, seperti mantan Dirut Indonesia Power (IP) Firdaus Akmal dan Abimanyu Suyoso yang saat ini menjabat Dirut Indonesia Power. Bahkan, kata Okky, beberapa direksi PLN juga layak menjadi dirut.

Juru bicara PLN Muljo Adji mengatakan masa jabatan direksi saat ini belum berakhir. Masa jabatan itu, kata dia, dihitung berdasarkan pergantian susunan direksi yang terjadi pada tahun 2003. ■ c40/ant

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA...
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 18

TAHUN 2006

BUMN

Sugiharto Ingin Menjaga Kinerja PLN

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Negara BUMN Sugiharto menegaskan, demi menjaga tidak terganggunya kinerja PT Perusahaan Listrik Negara, maka pihaknya segera meminta penjelasan dari Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung mengenai kejelasan status direksi PT PLN yang tersangkut kasus korupsi.

"Dalam kasus PLN akan dilihat seberapa dalam kesalahan dari masing-masing pejabat yang terlibat. Saya akan menanyakan langsung ke pihak Polri dan Kejaksaan, sebab informasinya saat ini simpang siur, katanya direksi yang terlibat malah akan dibebaskan," ujar Sugiharto dalam percakapan dengan *Kompas*, akhir pekan kemarin.

Kasus korupsi PT PLN yang sedang disidik Mabes Polri saat ini adalah dugaan penggelembungan nilai proyek pembelian mesin gas turbin untuk PLTG Bōrang, Sumatera Selatan. Dalam kasus ini polisi telah menahan tiga orang tersangka, yaitu Direktur Pembangkitan dan Energi Primer PT PLN Ali Herman Ibrahim, Deputi Direktur Pembangkitan Agus Darmadi, dan

kontraktor pengadaan barang Johannes Kennedy Aritonang.

Akibat penggelembungan pembelian gas turbin itu negara dirugikan sampai Rp 100 miliar. Selain dua pejabat PLN itu, polisi

“

Dalam kasus PLN akan dilihat seberapa dalam kesalahan dari masing-masing pejabat yang terlibat.

sudah empat kali memeriksa Direktur Utama PT PLN Eddie Widiono dan sekali memanggil Direktur Keuangan PT PLN Parno Isworo. Namun, status keduanya masih sebagai saksi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, direksi dapat diganti apabila tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati

dalam kontrak manajemen, tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, melanggar ketentuan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan, dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, meninggal dunia, dan mengundurkan diri.

Selain mengevaluasi kinerja PLN, Kementerian Negara BUMN juga sedang mengevaluasi PT Pertamina. Sugiharto mengatakan, ada tiga hal mengenai masalah Pertamina yang harus segera diselesaikan, yaitu percepatan reformasi Pertamina, audit menyeluruh, dan perombakan kepemimpinan.

"Arahnya memang ke penggantian, tetapi sampai sekarang saya belum tanda tangani suratnya, karena untuk kinerja direksi itu ada kontrak manajemen. Direksi Pertamina dinilai belum mampu menunjukkan kinerja yang kredibel," ujar Sugiharto. Akibat dinilai tak mampu memberi laporan keuangan yang kredibel, pemerintah mengembalikan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan PT Pertamina. (DOT/OTW)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 7

TAHUN 2006

PLN Akan Bangun PLTGU Bontang

JAKARTA – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menyatakan niatnya untuk membangun pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) di Bontang, Kalimantan Timur, berkapasitas 2x75 megawatt (MW), pada 2009. Pembangunan pembangkit berbahan bakar batu bara ini dilakukan guna mengatasi kurangnya pasokan listrik di Kalimantan Timur.

Deputi Direktur Energi Primer Tonny Agus Mulyantono memaparkan, pembangkit listrik baru ini akan menggunakan kombinasi gas turbin yang bisa meningkatkan kapasitas hingga 150 MW.

“Saat ini, kami masih berdiskusi tentang kemungkinan penerimaan pasokan gas sekitar 20 juta kaki kubik per hari (mmscfd, red) dari KKS BP Migas, Total Indonesia,” ujar Tonny kepada *Investor Daily* di Jakarta, akhir pekan lalu.

Hanya saja, Tonny masih enggan membeberkan waktu penandatanganan kontrak jual beli gas (*gas sales agreement/GSA*). Pasalnya, pembahasan PLN masih belum menyentuh soal pembangkit. Namun, ia mengakui, pasokan sekitar 20 mmscfd itu belum mencukupi membangkitkan listrik selama 24 jam.

“Saat ini, PLN dan BP Migas telah menandatangani nota kesepahaman (*memorandum of understanding/MoU*) untuk mencari pasokan gas ke Bontang. Tapi, itu juga baru enam bulan lagi kepastian (sertifikasi) cadangannya dari BP Migas,” tutur dia.

Namun, Tonny berharap, PLTGU ini bisa mulai beroperasi komersial pada 2009. Selain untuk memasok kebutuhan listrik di Bontang, keberadaan PLTGU ini juga akan memenuhi pasokan listrik di Tenggarong, Balikpapan dan Samarinda.

Sementara itu, salah seorang sumber di PLN menyatakan, sejumlah investor telah menyatakan minatnya untuk membangun PLTGU Bontang, antara lain kedua anak perusahaan PLN, yakni PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) dan PT Indonesia Power (IP), *East-Asia Pacific Indonesia* (EAPI) yang merupakan anak perusahaan migas Pacific Oil & Gas, dan Pemerintah Daerah Kutai Kertanegara.

Saat ini, PLN secara bertahap berupaya mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan BBM untuk pembangkit listriknya. Saat ini, ketergantungan PLN terhadap BBM masih 30%, sementara pada tahun 2006 diharapkan bisa turun hingga 22-23%.

Bahkan, Direktur Utama PLN Eddie Widiono menyatakan, PLN telah menargetkan pemakaian BBM hanya 8% pada 2008. Dengan catatan, lanjutnya, jika penggunaan gas alam cair atau LNG sebagai alternatif bahan bakar pembangkit listrik PLN bisa diterapkan pada tahun 2008.

PLN memprediksikan, penggunaan gas yang dimulai pada 2008 dapat menggantikan pemakaian BBM sebesar 28 juta kiloliter (kl) atau setara dengan penghematan biaya produksi lebih dari Rp 118 triliun. (lan)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<ul style="list-style-type: none"> ● BISNIS INDONESIA ○ INVESTOR DAILY ○ KOMPAS ○ KORAN TEMPO ○ MEDIA INDONESIA ○ PIKIRAN RAKYAT ○ RAKYAT MERDEKA ○ REPUBLIKA ○ SUARA KARYA 	<ul style="list-style-type: none"> ○ SUARA PEMBARUAN ○ SINAR HARAPAN ○ TABLOID KONTAN ○ THE JAKARTA POST ○ MAJALAH GATRA ○ MAJALAH TEMPO ○ MAJALAH TRUST ○ 	
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : TS		TAHUN 2006

'Kasus di PLN terkait masa jabatan dirut'

ANTARA

JAKARTA: Ketua Umum Forum Komunikasi Putra-Putri Pensiunan PLN (PK4P) Okky Setiawan mensinyalir berbagai kasus PLN sekarang ini terkait dengan telah habisnya masa jabatan direksi, khususnya dirut di BUMN listrik itu.

"Karenanya, pemerintah harus segera mengambil sikap mengenai nasib direksi PLN," katanya, kemarin.

Menurut dia, jika permasalahan pergantian direksi PLN tersebut dibiarkan terkatung-katung cukup lama, bisa memengaruhi kinerja perusahaan.

Saat ini, BUMN dengan nilai aset sekitar Rp200 triliun itu tengah dirundung berbagai masalah mulai dari kasus korupsi pemberian tantiem, aksi jahit mulut korban saluran udara tegangan ekstra tinggi,

kasus korupsi pengadaan PLTG Borang, Palembang, dan penolakan masyarakat atas rencana kenaikan tarif dasar listrik.

Hal senada dikemukakan anggota Komisi VII DPR Wahyudin Munawir.

"Saya dengar, masa jabatan direksi khususnya Dirut PLN seharusnya sudah habis. Jadi, sebaiknya pemerintah terutama Kementerian BUMN segera mengambil sikap," kata anggota dewan dari Fraksi PKS itu.

Eddie Widiono menjabat Dirut PLN menggantikan Kuntoro Mangkusubroto melalui Keputusan Menkeu No. 108/KMK.05/2001 pada Maret 2001.

Menanggapi hal itu, juru bicara PLN Muljo Adji mengatakan masa jabatan direksi saat ini belum berakhir. "Se-suai Anggaran Dasar maka

masa jabatan direksi masih dua tahun lagi."

Masa jabatan itu, lanjutnya, dihitung sejak pergantian direksi pada 2003 melalui Keputusan No. 062.K/010/DIR/2003, tanggal 4 Maret 2003.

Namun, menurut Muljo, bisa saja pemerintah mengganti direksi sebelum berakhirnya masa jabatan karena beberapa alasan seperti karena mengundurkan diri atau dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya.

Mengenai figur direksi PLN yang layak, menurut Wahyudin, calon direksi harus memiliki tiga kriteria dasar yakni profesional, jujur dan memiliki keberpihakan kepada rakyat.

"Tidak masalah apakah orang itu dari dalam atau luar PLN," tambahnya.

Sementara, Okky berpendapat sebaiknya posisi dirut PLN

diisi orang dalam yang tentunya mengerti seluk-beluk BUMN itu.

"PLN merupakan BUMN yang sangat teknis, sehingga sangat berisiko bila diisi orang dari luar PLN, apalagi dari parpol," ujarnya.

Menurut dia, sejumlah nama dari dalam PLN yang layak menjadi dirut di antaranya mantan Dirut Indonesia Power (IP) Firdaus Akmal, Dirut IP Abimanyu Suyoso, Dirkeu IP Praktimia Semiawan, dan Wakil Dirut Dana Pensiun PLN W. Sulaiman.

Sedang, sejumlah nama direksi PLN saat ini, lanjut Okky, juga layak menempati posisi dirut seperti Direktur Transmisi dan Distribusi Herman Darnel Ibrahim, Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan Sunggu Aritonang, dan Dirkeu Parno Isworo.

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA		<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																												
KODE: <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI		<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																										
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 9												TAHUN 2006																		

Sumut Krisis Listrik

BEBERAPA wilayah di Sumatra Utara (Sumut) belakangan kerap gelap gulita di malam hari akibat pemadaman listrik. Penyebabnya bukan karena kerusakan jaringan listrik, melainkan memang pasokan listrik untuk provinsi ini kurang alias defisit.

Defisit listrik di Sumut mencapai sebesar 120 megawatt (mw). Padahal, penambahan konsumsi listrik oleh pelanggan sekitar 100 mw per tahun atau 10% dari 2,2 juta pelanggan.

"Berarti kami membutuhkan sekitar 220 mw agar dapat mengatasi defisit listrik sekaligus memenuhi kebutuhan pelanggan yang meningkat setiap tahun," kata Deputi Manajer Hukum dan Humas PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pembangkitan Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) Marodjahan Batubara kepada *Media Indonesia* di Medan, Jumat (17/1).

Produksi maksimal listrik Sumbagut saat ini memang hanya sekitar 979 mw. Angka ini lebih kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan pelanggan yang mencapai 1.047 mw. Karena defisit pasokan listrik, PLN memberlakukan pemadaman bergilir. Pemadaman bisa meluas

ketika PLN melakukan perbaikan mesin. Karena itu, tidak mengherankan selain kerap gelap gulita pada malam hari, pemadaman juga sering berlangsung pada siang hari dan membuat pelanggan merasa dirugikan.

Defisitnya listrik juga karena jumlah mesin pembangkit di Sumbagut sejak 1995 tidak pernah bertambah. Apalagi, kondisi pembangkit yang ada sudah terlalu tua, buatan antara 1967-1995. Dengan demikian, efisiensinya juga berkurang.

Karena itu, meski seluruh mesin pembangkit berkapasitas 1.224 mw, tetapi karena efisiensi maksimalnya 80%, mesin-mesin tersebut hanya mampu menghasilkan 979 mw. "Selama 10 tahun terakhir tidak ada penambahan pembangkit, sedangkan pertumbuhan pelanggan terus meningkat," ujar Marodjahan.

Mesin pembangkit milik PLN yang terdiri dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) unit 1, 2, 3, dan unit 4 Belawan, masing-masing berkapasitas 65 mw. Mesin-mesin itu buatan 1984 dan 1989.

Mesin lainnya, Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Blok 1 Belawan yang terdiri dari GT 11 (117,5 mw), GT 12 (128,8 mw), dan ST 10 (149

mw). Mesin-mesin itu buatan 1988, 1992, dan 1993.

PLTGU Blok 2 Belawan terdiri dari GT 21 (130 mw) GT 22 (130 mw) ST 20 (162,6 mw) adalah mesin buatan 1994 dan 1995. Mesin pembangkit JBE Paya Glugur (19,98 mw) dan AEG Paya Glugur (12,80 mw) buatan 1975 dan 1967. Mesin yang ada di

bergilir terpaksa dilakukan pada beban puncak atau pada saat perbaikan mesin pembangkit. Namun, pemadaman tidak meluas ke masyarakat. Ketika itu pemadaman bergilir kami lakukan pada sektor industri," ujar Marodjahan.

Penambahan pembangkit

Di tengah krisis listrik, Wakil Gubernur Sumut Rudolf M Pardede pada 11 Februari lalu meletakkan batu pertama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan I di Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir. Kapasitas pembangkit ini sebesar 180 mw. Untuk pembangunannya pemerintah utang kepada China sekitar Rp2,5 triliun.

Rencananya, proyek akan dimulai Juni mendatang dan mesin pertama akan selesai Desember 2009 dan mesin kedua dijadwalkan selesai Maret 2010. "PLTA Asahan I ini dapat meminimalisasi krisis listrik. Keberadaannya diharapkan juga dapat mendorong masuknya investor ke Sumut," kata Rudolf.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Sumut RE Nainggolan menyatakan optimistis PLTA Asahan I mampu mengatasi krisis listrik

'Selama 10 tahun terakhir tidak ada penambahan pembangkit, sedangkan pertumbuhan pelanggan terus meningkat.'

Pusat Listrik Paya Pasir dengan kapasitas 89,47 mw buatan 1976, dan Pusat Listrik Titi Kuning berkapasitas 24,84 adalah mesin buatan 1976.

Deputi Manajer Hukum dan Humas PLN Pembangkitan Sumbagut ini juga mengakui, krisis listrik di wilayahnya mulai terjadi pada 2002.

"Ketika itu, pemadaman

pada 2008. Apalagi, sejumlah pembangkit listrik lainnya juga sedang dibangun dan beberapa di antaranya segera beroperasi.

PLTA Lau Renun yang berkapasitas 82 mw, misalnya, mulai beroperasi pada tahun ini. Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) Labuhan Angin berkapasitas 230 mw diperkirakan beroperasi pada 2008. Pembangkit batubara PT Cahaya Sakti Sicanang berkapasitas 100 mw akan beroperasi pada 2006, Pembangkit Listrik Tenaga Gas Sarulla (100 mw) diperkirakan beroperasi 2007, pasokan listrik PT Inalum sebesar 45 mw sudah disalurkan, dan PLTA Sipan Sihaporas berkapasitas 60 mw sudah beroperasi, tapi belum disalurkan.

"Jika pembangunan dapat dilaksanakan tepat waktu, krisis listrik di Sumut teratasi pada 2008 mendatang," ujar Nainggolan.

Apalagi, interkoneksi listrik pada akhir 2007 sudah terhubung dari Riau ke Sumut.

Dalam hitungan kertas, pembangkit listrik baru itu akan menghasilkan sekitar 797 mw dua tahun mendatang. Semoga itu bisa mengatasi defisit listrik di Sumut. ● Kennorton Hutasoit/
Yennizar Lubis/N-1

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA		<input checked="" type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																												
KODE: <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI		<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																										
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN: 17												TAHUN 2006																		

Pasokan Listrik Jawa-Bali akan Semakin Andal

PEMBANGKIT Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cilacap unit I telah beroperasi, walaupun masih dalam tahap uji coba. Diperkirakan, 20 Februari 2006, pembangkit dengan kapasitas 300 Megawatt (MW) itu akan beroperasi secara komersial dan langsung memperkuat sistem interkoneksi Jawa-Bali, melalui jaringan 150 kilovolt (KV) jalur selatan.

Empat bulan kemudian, diharapkan pembangkit unit II dengan kapasitas sama, 300 MW menyusul beroperasi secara komersial. Dengan demikian, pasokan listrik untuk Pulau Jawa dan Bali sampai pertengahan tahun ini akan bertambah sebesar 600 MW.

Meski kedua unit pembangkit itu belum beroperasi penuh, PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) menargetkan akan menambah kapasitas PLTU Cilacap sebesar 600 MW lagi, sehingga nantinya total kapasitas pembangkit berbahan bakar batu bara tersebut mencapai 1.200 MW. Namun, belum dapat dipastikan kapan penambahan kapasitas dilakukan.

PLTU Cilacap dikelola oleh PT Sumber Segara Primadaya (S2P), yang merupakan perusahaan patungan PT PJB, anak perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara, dengan PT Sumberenergi Sakti Prima. Menurut Direktur Operasi PT S2P Dandung Agus Sulaeman, penambahan kapasitas di PLTU Cilacap sangat memungkinkan.

"Karena fasilitas pendukung yang ada masih mencukupi. Seperti, dermaga dan fasilitas pengolahan air laut menjadi air tawar, masih sangat mencukupi untuk mendukung penambahan kapasitas pembangkit sebesar 600 Megawatt lagi," katanya.

Perkuat Jalur Selatan

Saat ini, persiapan operasional PLTU Cilacap unit I sudah mencapai 90 persen. "Kami optimistis, 20 Februari nanti, unit satu beroperasi komersial. Baru nanti unit dua menyusul, sekitar pertengahan tahun. PLTU Cilacap menjadi sangat vital, karena pembangkit ini merupakan satu-satunya PLTU yang ada di wilayah selatan Pulau Jawa. Kami sangat bangga, karena pembangunan PLTU Cilacap tercatat sebagai yang tercepat di dunia.

Pembangunan PLTU ini penuh perjuangan keras, karena kondisi alam seperti gelombang laut selatan yang lebih ganas ketimbang laut utara," Dandung menambahkan.

Umumnya pembangunan dua unit PLTU dengan kapasitas total 600 MW memerlukan waktu paling cepat 36 bulan. Tetapi, PLTU Cilacap telah rampung pembangunannya hanya dalam waktu 24 bulan. "Itu sesuai keinginan kami, yang kemudian kami sepakati dengan mitra kerja, Chengda Engineering Corporation of China," ujar Dandung.

Pembangunan PLTU Cilacap, secara keseluruhan menelan investasi sebesar US\$ 510 juta. Bila dihitung

per Kwh (*Kilowatt hour*) listrik yang dihasilkan, pembangunan PLTU lebih murah bila dibandingkan dengan PLTU lain, yakni hanya sekitar US\$ 850 per Kwh, sedangkan umumnya biaya pembangunan pembangkit mencapai US\$ 1.000 per Kwh.

Harga jual listrik PLTU Cilacap juga kompetitif, hanya US\$ 4,57 sen per Kwh, sementara harga jual listrik yang dihasilkan PLTU lain berkisar US\$ 4,6 sen hingga US\$ 4,93 sen per Kwh.

Mesin pembangkit di PLTU Cilacap didesain tidak hanya dapat dioperasikan dengan bahan bakar batu bara, tetapi juga bahan bakar minyak (BBM). Namun, penggunaan batu bara sangat diprioritaskan.

"Sebab, kita memang akan menekan penggunaan BBM. Lagi pula, pasokan batu bara untuk PLTU Cilacap sudah terikat kontrak selama lima tahun.

Setiap tahun, kami memerlukan 2,2 juta ton batu bara. Selama lima tahun ke depan, pasokan batu bara, aman. Pemasok yang sudah terikat kontrak dengan kami, seperti Adaro, Kodeco, dan Jorong. Penggunaan BBM hanya dilakukan pada saat *start*, dan itu memang umum dilakukan di semua PLTU di mana pun," kata Direktur Teknis PT S2P, Harry Satria.

Harry menambahkan, keandalan operasional PLTU Cilacap akan sangat menentukan bagi keandalan pasokan listrik untuk Pulau Jawa dan Bali, terutama dari jaringan

150 KV jalur selatan. Saat ini listrik Jawa-Bali teramat bergantung pada jaringan 150 KV dan 500 KV jalur utara. Padahal, jika hanya dengan satu jalur transmisi, keandalan pasokan listrik akan lebih sering mengalami gangguan.

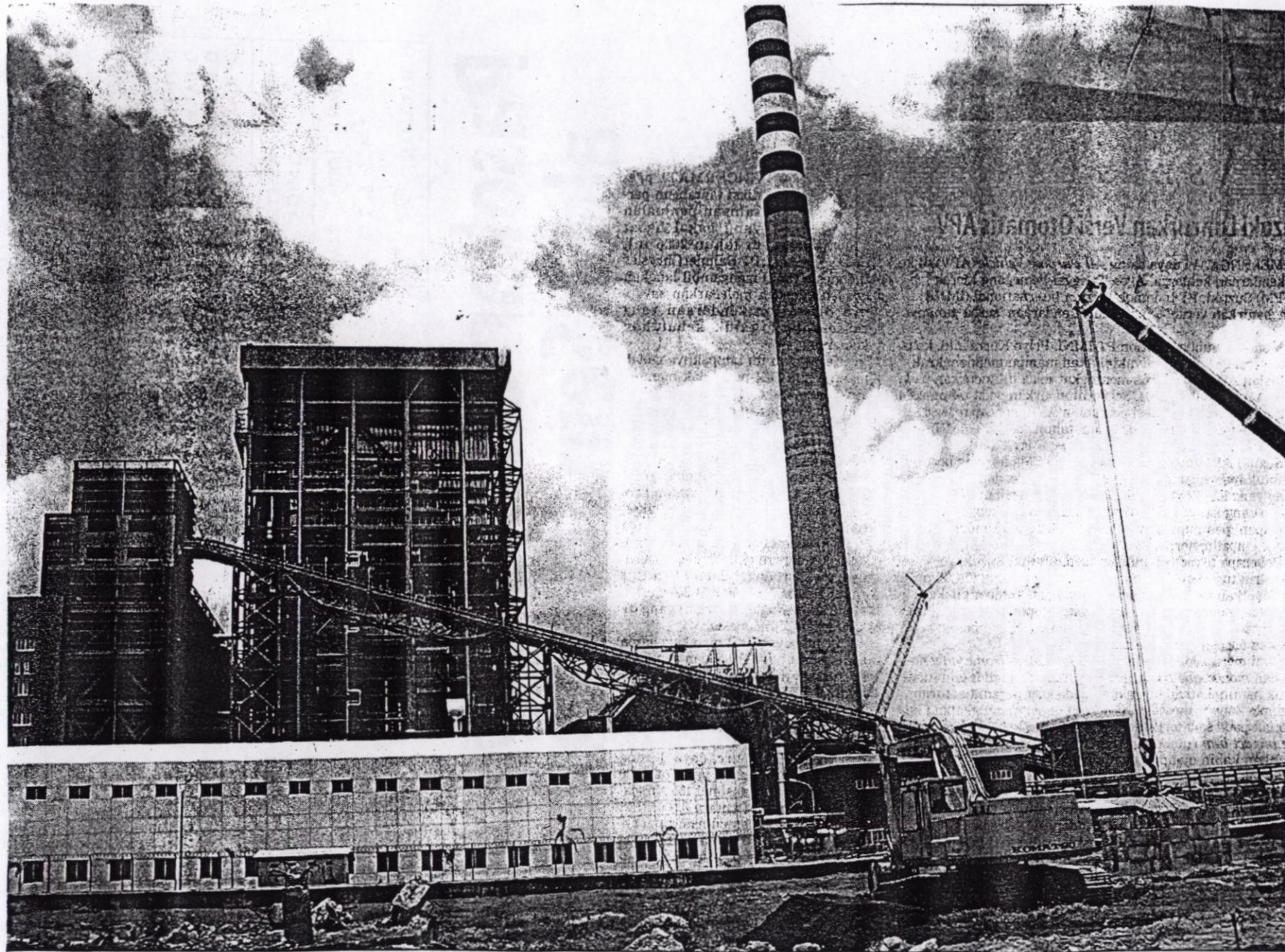
"Apalagi kalau jaringan itu terganggu dan tidak ada

pengganti yang siap mengambil alih, maka pemadaman akan terjadi. Saat ini PLTU Cilacap adalah satu-satunya PLTU yang berada di wilayah selatan Jawa, sekaligus menjadi pembangkit utama yang akan memperkuat sistem transmisi Jawa-Bali jalur selatan.

Selama ini, sistem transmisi 150 KV jalur selatan sangat rentan tegangan, atau pada malam hari pada saat beban puncak hanya mampu bertegangan 135 KV dari yang seharusnya 150 KV. Dengan masuknya PLTU Cilacap ke sistem Jawa-Bali, akan memperbaiki tegangan hingga mencapai minimum 148 KV," Harry menjelaskan.

Terkait pembangunan PLTU Cilacap yang dipercayakan kepada Chengda, menurut Harry, salah satu pertimbangannya karena perusahaan itu menawarkan jaminan (garansi) yang tidak lazim diberikan oleh perusahaan lain.

"Kita mendapatkan jaminan dua tahun untuk operasional dan tiga tahun untuk



PEMBARUAN/HENNY A DIANA

PEMBANGKIT BARU – Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cilacap di Jawa Tengah, ditargetkan beroperasi secara komersial pada 20 Februari 2006. Pembangkit baru berkapasitas 300 MW ini menggunakan bahan bakar batu bara. PLN terus mengupayakan menambah jumlah pembangkit listrik yang berbahan bakar non-BBM.

14
suku cadang. Kalau perusahaan lain, hanya memberikan garansi satu tahun operasi, suku cadang tidak," katanya.

Direktur Proyek PLTU, Cilacap Liu Yiheng, yang juga mewakili Chengda menanamkan bahkan, mesin yang dibawa perusahaannya akan mampu menunjang operasional hingga lebih dari 25 tahun.

Apalagi, keandalan mesin sudah teruji sejak beberapa dekade dan digunakan oleh hampir 300 pembangkit listrik berbahan bakar batu bara yang berkapasitas 300 MW, bukan hanya di Cina tetapi juga di beberapa negara lainnya.

PEMBARUAN/
HENNY A DIANA

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input checked="" type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN .. (FEB) MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 (18) 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN: 16		TAHUN 2006

Dunia Usaha Lirik B to B

**Titik temu dengan PLN
diharapkan
dapat tercapai.**

JAKARTA — Dunia usaha mulai melirik opsi negosiasi *business to business (B to B)* dengan PT PLN (persero) dalam menentukan tarif dasar listrik (TDL). Diharapkan, dengan cara ini akan muncul solusi saling menguntungkan antara pengusaha dan PLN.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Benny Soetrisno, mengatakan, cara *B to B* bisa merasionalisasi harga PLN secara keseluruhan kepada industri. Ia meminta PLN memiliki *benchmark* pada keadaan industri di negara lain.

Benny menjelaskan, saat ini dunia usaha belum selesai mencerna secara sempurna sejumlah kenaikan seperti bahan bakar minyak. Jadi sesungguhnya kenaikan TDL belum disanggupi dunia usaha. "Tapi, dunia pertekstilan bersedia berunding dengan PLN," tegasnya di Jakarta, Jumat (17/2).

Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia, MS Hidayat, bersedia berdialog dengan PLN membahas kenaikan dan negosiasi TDL tersebut. Hidayat mengatakan Kadin akan membuat klasifikasi sektor industri berdasarkan kekuatan menanggung kenaikan TDL.

Saat bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Hidayat sudah menyampaikan keberatan kenaikan TDL bila berlaku tahun ini. "Tapi kelihatannya pemerintah tidak sanggup bila tidak tahun ini," jelasnya. Yang jelas, lanjutnya, perundingan secara *business to business* akan dilakukan setelah audit biaya pokok produksi PLN rampung pada awal Maret nanti.

Untuk mengatasi dampak lebih besar atas rencana kenaikan TDL pada tahun ini, Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengusulkan agar dilakukan pendekatan *B to B*. Pada awalnya, kalangan pengusaha menolak ide tersebut, meski sebetulnya sejak lama pola seperti ini sudah dilakukan PLN dengan beberapa industri.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), Thomas Darmawan, berharap pemerintah juga menyentuh industri kecil menengah dalam kai-

tannya dengan TDL. "Mereka ini hanya bisa pasrah," ujar Thomas. Pasalnya, mereka termasuk pengguna listrik rumah tangga yakni kategori R-1 (450 hingga 2.200 watt).

Menurut Thomas, terdapat sekitar 950 ribu pengusaha besar hingga kecil di bidang makanan dan minuman. Industri terkait makanan yang paling terpukul bila TDL naik adalah pabrik es. Pasalnya pabrik ini menggunakan 60 persen dari 80 persen listrik untuk energinya. Selain itu, pabrik es krim juga akan terpukul dengan kenaikan TDL.

Pemerintah diminta untuk menaikkan TDL secara bertahap agar tidak mengganggu *cash flow* perusahaan. Selain itu, pemerintah juga diharapkan segera mensosialisasikan penggunaan briket batu bara dan tungkunya, sebagai alternatif pengganti minyak tanah yang subsidiya makin dikurangi.

Kenaikan TDL dikatakan Menteri Perindustrian, Fahmi Idris, bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Dunia usaha diminta pengertiannya oleh Fahmi mengenai ini. Indonesia akan menjadi negara yang tidak sehat bila pemerintah mensubsidi hampir dari separuh dana yang harus dibayarkan PLN.

Hasil perundingan lewat mekanisme *business to business* akhirnya nanti akan ditetapkan pemerintah. "Mungkin, ini semua ada pro kontranya," ujar Fahmi. Tapi lewat perundingan, titik temu diharapkan dapat dicapai.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyambut baik usulan Menteri Perindustrian untuk merundingkan biaya struktur sebagai basis penentuan tarif dasar listrik secara *business to business (B to B)* dengan dunia usaha. Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN, Sunggu Anwar Aritonang, mengatakan pemikiran-pemikiran yang baik bisa saja diterapkan. "PLN akan mendukung usul pemerintah," ujar dia, Jumat (10/2), usai bertemu Menteri Perindustrian di Departemen Perindustrian.

Apabila nantinya mekanisme pembahasan *B to B* tersebut disetujui, hasil pembahasannya akan diungkap secara terbuka kepada masyarakat. Saat ini, PLN masih menunggu hasil audit biaya pokok produksi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kendati PLN sudah memiliki perhitungan sendiri tentang kenaikan TDL, namun jumlah pastinya masih harus menunggu hasil audit rampung. ■ c33

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>
---	--

KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
--	---	---

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											

HALAMAN: 0 **PEMADAMAN BERGILIR** TAHUN 2006

Pelanggan Merasa Dirugikan

SERING terjadinya pemadaman listrik membuat pelanggan di Medan mengeluh, termasuk pelaku usaha kecil pengguna listrik yang dirugikan.

Evi Baros, 55, salah seorang penjahit di kawasan Tanjung Sari, Medan, belakangan kerap uring-uringan karena baju jahitannya menumpuk tidak bisa segera diselesaikan akibat listrik untuk tenaga penggerak mesin jahit tidak pasti kapan menyala. Padahal, para pelanggannya terus mendesak agar baju pesanan mereka segera diselesaikan.

"Bagaimana mau diselesaikan kalau listrik sering mati. Dalam satu hari bisa dua kali mati. Belum selesai mengerjakan jahitan satu baju, listrik mati lagi. Lama-lama saya bisa ditinggal pelanggan karena kecewa jahitan tidak selesai tepat waktu," keluh Evi saat ditemui *Media Indonesia*, akhir pekan lalu.

Menurut Evi, dia kehilangan 50% dari keuntungan yang seharusnya diperoleh. Dalam kondisi normal, sehari dia bersama seorang pekerjanya mampu menyelesaikan dua pasang baju dengan keuntungan hingga Rp350 ribu tetapi kini, perempuan ini hanya bisa menyelesaikan satu pasang baju.

Evi mengaku selalu membayar tagihan listrik tepat waktu. Namun, ia kecewa terhadap pelayanan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang tidak maksimal. "Sebagai pelanggan listrik yang selalu membayar tepat waktu, tidak salah kalau saya menginginkan pelayanan yang baik. Apalagi, listrik menjadi salah satu penunjang usaha saya," katanya.

Karena itu, dia juga menganggap pemutusan sambungan listrik yang dilakukan PLN kepada pelanggan yang terlambat membayar tagihan

sebagai tindakan tidak *fair*. "Kalau kita terlambat bayar, aliran listrik langsung dimatikan," ujar Evi.

Hal yang sama juga diungkapkan Yusran, 62, pengusaha kipang (makanan dari berondong jagung manis) di Jl Bromo, Medan Area. Banyak pelanggannya beralih membeli jajanan lain karena Yusran tidak mampu memasok kipang seperti biasanya gara-gara aliran listrik yang menjadi tenaga pengolah jagung sering padam.

Biasanya, dalam sehari Yusran bersama anggota keluarganya mampu menghasilkan 30 bal kipang dengan harga Rp8.500 per bal. Tetapi, akhir-akhir ini dia hanya mampu memproduksi 15 bal kipang. "Sejak listrik sering padam omzet usaha saya Rp127 ribu per hari," ujarnya.

Pelanggan rumah tangga juga kesal menghadapi dampak krisis listrik di Sumut, sebab selain listrik sering padam, voltasenya juga tidak stabil. Banyak warga mengaku barang elektronik mereka rusak karena kondisi listrik yang demikian.

Neneng, 35, warga Medan Johor mengungkapkan, dia harus mengeluarkan uang ekstra untuk memperbaiki televisi miliknya yang rusak akibat voltase listrik yang turun naik.

Direktur Yayasan Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen Farid Wajdi mengatakan, pemadaman listrik di Sumut melewati batas toleransi. Menurut dia, seharusnya konsumen menerima ganti rugi sebesar 10% dari beban biaya seandainya pemadaman berlangsung sebanyak 10 kali.

"Itu sesuai Keppres (Keputusan Presiden) No 103 Tahun 2003. PLN memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi," ujar nya.

● Yennizar Lubis/Kennorton Hutasoit/N-1

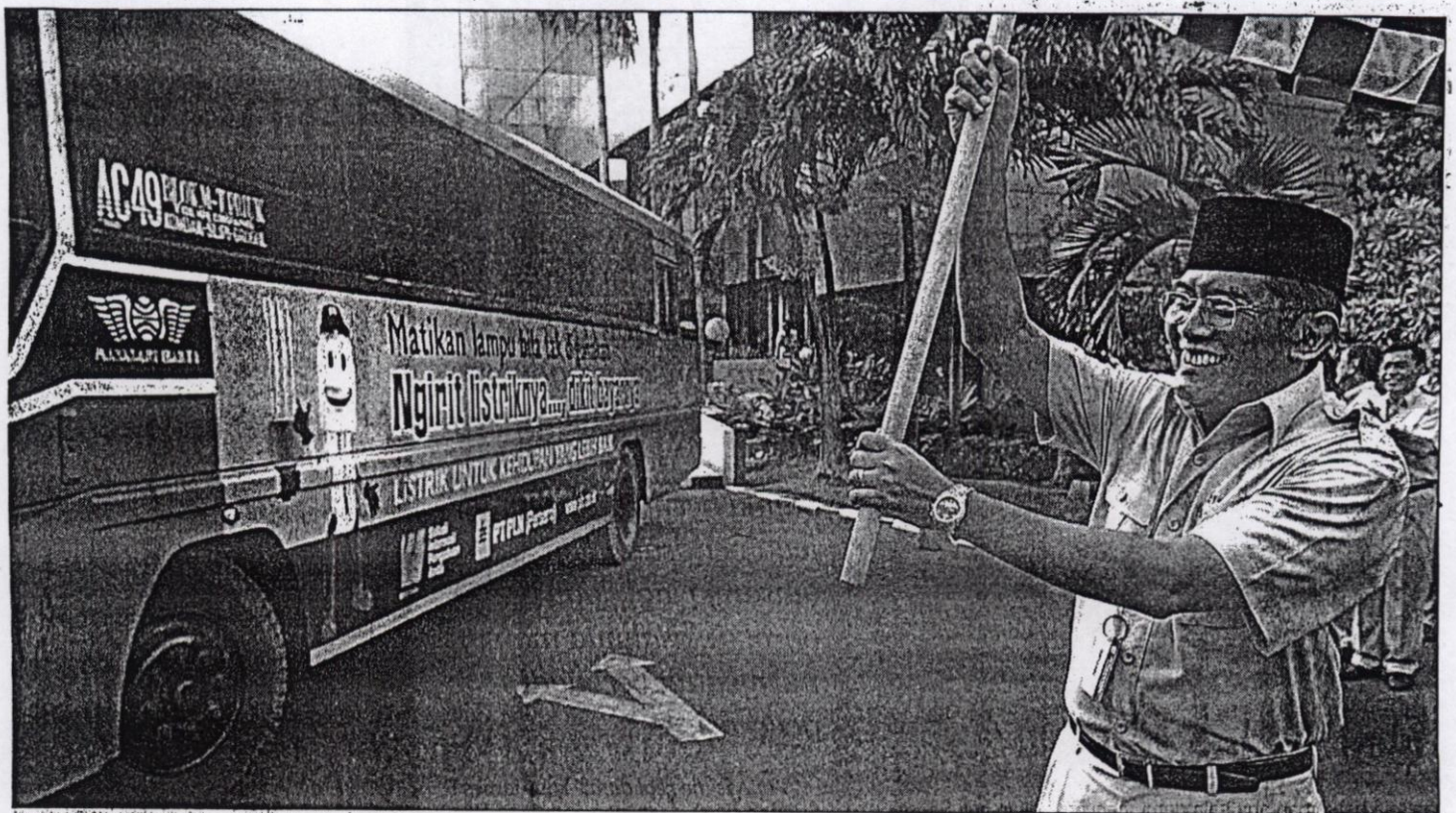
Kondisi Mesin Pembangkit Listrik

No	Mesin Lama	Tahun Mulai Operasi
1.	PLTU Belawan Unit 1, Unit 2, Unit 3, dan Unit 4. Tiap unit berkapasitas 65 mw	1984-1989
	PLTGU Belawan Blok 1 GT 11 (117,5 mw) GT 12 (128,8 mw) ST 10 (149 mw)	1988-1993
	PLTGU Belawan Blok 2 GT 21 (130 mw) GT 22 (130 mw) ST 20 (162,6 mw)	1994-1995
2.	JBE Paya Glugur (19,98 mw) AEG Paya Glugur (12,80 mw)	1967-1975
3.	Pusat Listrik Paya Pasir (89,47 mw)	1976-1983
4.	Pusat Listrik Titi Kuning (24,84 mw)	1976
Total 1.224,97 mw dengan efisiensi 80% atau maksimal produksi listrik 979,98 mw		
No	Mesin Baru	Tahun Mulai Operasi
1.	PLTA Lau Renun (82 mw)	2006
2.	PLTP Labuhan Angin (230 mw)	2008
3.	Pembangkit Listrik Batu Bara Sicanang (100 mw)	2006
4.	PLTG Sarulla (100 mw)	2007
5.	PT Inalum (45 mw)	2005
6.	PLTA Sipan Sihaporas (60 mw)	2006
7.	PLTA Asahan I (180 mw)	2009/2010
Total		797 mw

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN <u>FEB</u> MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 <u>20</u> 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 7		TAHUN 2006



HEMAT LISTRIK –
Direktur Utama PT
Perusahaan Listrik Negara
(PLN) Eddie S Widiono
melepas bus promo di
kantor pusat PLN di
Jakarta, pekan lalu. Bus
umum tersebut
bertuliskan ajakan
kepada masyarakat untuk
berhemat listrik.